

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 6 Agustus 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| A | Provinsi Jawa Barat | | |
| | 1 | Serapan Dana Rendah | <i>Pikiran Rakyat/Hal. 1</i> |
| B | Kota Bandung | | |
| | 2 | Anggaran RPM Rp 126.3 M | <i>Galamedia/Hal. 3</i> |

Berita : Anggaran RPM Rp 126.3 M

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 3

Edisi : Kamis, 6 Agustus 2020

Serapan Dana Rendah karena Kendala Penyaluran Bantuan Sosial

BANDUNG, (PR). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui adanya keterlambatan penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19 tahun 2020. Hal itu karena penyaluran tahap pertama bantuan sosial Provinsi Jabar berlangsung selama 65 hari. Padahal, waktu ideal untuk penyaluran saat itu seharusnya 15 hari.

Sebagaimana diberitakan, nilai bantuan sosial provinsi dalam satu tahapnya mencapai Rp 700 miliar. Bahkan, pada tahap pertama, jumlahnya lebih besar dengan adanya penerima dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurrachim mengatakan, jika lancar dari awal, semestinya penyaluran bansos provinsi—yang direncanakan berlangsung empat tahap tersebut—sudah rampung pada Agustus 2020 ini. Namun, karena adanya kendala pada tahap pertama, hingga Juli kemarin, pemprov baru menuntaskan penyaluran tahap kedua.

Menurut dia, bansos atau jaring pengaman sosial memiliki porsi yang

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

lebih besar dalam pos belanja tak terduga (BTT) provinsi yang nilai totalnya mencapai Rp 4,5 triliun.

"Hitungan kasar untuk bansos itu 1,4 juta RTS (rumah tangga sasaran), dikali Rp 500.000, itu (jumlahnya) Rp 700 miliar. Kalau lancar April sampai Juli itu, sudah terserap Rp 2,8 triliun. Permasalahannya, tahap pertama itu mundur 50 hari. Idealnya tiap bulan tersalurkan," kata Dudi yang juga menjabat Ketua Tim Penyaluran Bansos pada Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Rabu (5/8/2020).

Ia mengungkapkan, hingga tanggal 27 Juli 2020, dana penanganan Covid-19 yang sudah terserap mencapai Rp 2,3 triliun. Perinciannya, dana jaring pengaman sosial terserap 48,16% (dari total anggaran Rp 3,864 triliun), dana

bidang kesehatan 70,82% (dari total anggaran Rp 397,4 miliar), dan dana operasional gugus tugas 95,59% (dari total anggaran Rp 20 miliar).

Untuk bantuan sosial tahap ketiga, kata Dudi, saat ini tengah dibahas. Demikian pula halnya untuk bidang kesehatan. Pemprov berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan semua program, di antaranya pengadaan alat kesehatan. "Untuk dana operasional gugus tugas, itu sudah diserap oleh 13 divisi, di antaranya untuk rapat, perjalanan dinas. Kalau divisi *tracing*, pasti mereka menggunakan (dana itu) untuk pelacakan ke lapangan," ujarnya.

Meski sisa anggaran operasional gugus tugas kurang dari Rp 1 miliar, Dudi meyakini, pekerjaan akan optimal hingga penyerapan anggaran terserap mak-

simal. "Bisa (masih cukup) karena selain itu, kita gunakan, ada biaya operasional lain, ada LO gugus tugas. Dari luar pemprov, *kan* kita sertakan non-pemprov, seperti dari kejaksaan, dari polda (yang juga punya dana operasional masing-masing)," ujarnya.

Dudi menyatakan akan terus mendorong agar dilakukan akselerasi penyerapan anggaran Covid-19, terutama pada bansos dan bidang kesehatan. Meskipun demikian, langkah percepatan tersebut dilakukan dengan menaati aturan. Pihaknya melibatkan polda dan BPKP dalam prosesnya.

"Saya tidak mau di ujung (dilaksanakan) audit, mending (selama) diproses (dilaksanakan) audit. Saya tidak mau

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Serapan Dana

(Sambungan dari hal. 1 kol. 7)

permasalah, berisiko. Mereka (polda, BPKP) diajak dalam proses pengadaan, di Bulog, kemudian tahap distribusi juga kami ajak. Saya ingin tiap tahap *clear*," ucapnya.

Minta keterangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat segera meminta keterangan dari pemrov mengenai tingkat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Diketahui, anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jabar belum seluruhnya terealisasi.

"Kita pasti minta (laporan pertanggungjawaban secara tertulis). Mau enggak mau, kita (DPRD) harus mengetahui. Kemudian, ini *kan* berkaitan dengan anggaran perubahan. Jadi, nanti hasil akhirnya, berapa yang dieksekusi (realisasi) dan berapa alokasi awalnya, kita harus tahu. Itu jadi dasar evaluasi semester I, dilanjutkan menyusun program semester II untuk kemudian menyusun APBD Perubahan," ucap anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady, kemarin.

Secara umum, kata dia, pemprov memang sudah memaparkan persentase penyerapan anggaran penanganan Covid-19 itu. Namun, laporan secara detail masih diperlukan untuk pendalaman. "Berapa total detailnya, belum terima. Dulu (laporan) masih global sekali yang disampaikan Sekda Provinsi Jawa Barat (Setiawan Wangsaatmaja) di Jatinangor saat rapim," katanya.

Penguatan data

Melihat tak seimbang serapan antara dana stimulus dengan operasional,

akademi dari Universitas Padjadjaran Prof Yudi Azis mengemukakan, dari sisi persentase, serapan dana operasional memang jauh lebih besar dibandingkan dengan stimulus. Namun, juga perlu dilihat angka absolut dari dana yang diserap.

Nilai Rp 1,6 triliun, menurut dia, juga harus diakui sebagai suatu capaian. Meskipun demikian, dia setuju, angka yang cukup besar tersebut tidak bisa jadi alasan.

Masih rendahnya serapan dana stimulus, menurut Yudi, tidak bisa dilepaskan dari kendala di birokrasi administrasi keuangan. Selain itu, perincian penempatan dana yang sesuai dengan urgensi dan prioritas sangat dinamis sehingga ada beberapa hambatan yang dihadapi.

"Di sisi lain, juga saat itu polanya belum ada. Karena merupakan hal baru, jadi yang di-*handle* adalah yang skala prioritas yang basis datanya masih ada angka *error* sehingga untuk mitigasi dampak dari gelombang pertama, khususnya yang terkait jaminan sosial, akhirnya direm supaya tidak timbul masalah baru," katanya, Rabu (5/8/2020).

Ia menyadari, situasi yang berlangsung membutuhkan penanganan yang cepat karena, baik jumlah kasus maupun penduduk miskin baru, tidak bisa menunggu lama.

Oleh karena itu, dia menilai, solusi agar penyerapan menjadi lebih cepat adalah dengan penguatan data dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk merapikan data yang tidak valid.

Secara paralel, sistem untuk mendukung penguatan data dibangun. Sistem tersebut bisa diakses banyak pi-

hak sehingga bisa mengakselerasi proses validasi. Harapannya, upaya tersebut akan menyelesaikan hambatan yang terjadi.

Walau saat ini serapan dana stimulus masih rendah, Yudi optimistis, kondisinya akan lebih baik pada masa yang akan datang dibandingkan dengan capaian saat ini. Alasannya, proses pembelajaran yang telah diperoleh dari pengalaman sebelumnya akan menjadi pijakan dan memudahkan tahapan berikutnya.

"Koordinasi tim telah terbentuk, pola akun sudah ada. Kemudian, beberapa aspek *item* sudah ditemukan sehingga sebenarnya sangat dimungkinkan untuk mengejar ketertinggalan ini. Tapi, tetap, penyebabnya harus diselesaikan dan ini membutuhkan komitmen bersama yang tinggi," katanya.

Disinggung mengenai besaran dana operasional yang tersisa kurang dari 5% sedangkan stimulus yang harus diserap masih di angka 80%, Yudi menilai, perlu ada penyesuaian dana operasional. Alasannya, kecil kemungkinan untuk menyerap seluruh dana stimulus yang tersisa dengan hanya mengandalkan sisa dana operasional. Akan tetapi, ia menekankan, dana penyesuaian tidak boleh diambil dari dana stimulus. Harus dari sumber lain yang tidak prioritas.

"Untuk berapa besaran penyesuaiannya, harus ada data lengkap. Tapi, seharusnya tidak besar karena merupakan penambahan, melengkap yang sudah digunakan sebelumnya. Prinsipnya efisiensi, tetapi harus efektif dan tidak melebihi dari alokasi dana operasional awal," ujarnya.

Ekonomi

Gubernur Ridwan Kamil

meminta semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota dan Kabupaten Cirebon untuk segera merealisasikan atau mempercepat belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi.

Menurut dia, di tengah situasi sulit saat ini, pembebanan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Saat ini, belanja pemerintah menjadi satu-satunya 'api' ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian di daerah ataupun nasional. Soalnya, tiga 'api' ekonomi lainnya, yakni ekspor, investasi, dan daya beli, sudah benar-benar padam dengan adanya pandemi Covid-19," katanya saat memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota dan Kabupaten Cirebon di Hotel Prima, Rabu (5/8/2020).

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan penyerapan anggaran. Apalagi, pemda juga telah mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat untuk melaksanakan sejumlah program padat karya.

Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, ia juga meminta pemerintah daerah untuk kembali menguatkan ekonomi berdasarkan ciri khas masing-masing.

"Kota Cirebon bisa memperkuat sektor pariwisata. Tarik wisatawan lokal sebanyak-banyaknya," katanya.

Sementara itu, Kabupaten Cirebon diminta untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus memperkuat posisi Jabar sebagai lumbung pangan nasional. (Ani Nunung Aryani, Ecepp Sukirman, Novianti Nurulliah, Yulistyne Kasumaningrum)***

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Anggaran RPM Rp 126.3 M

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 3

Edisi : Kamis, 6 Agustus 2020

Anggaran RMP

Rp 126,3 M

■ Untuk 56.376 Siswa dan Mahasiswa

Untuk bantuan pendidikan diberikan kepada 38.255 siswa sekolah swasta dan mahasiswa. Yakni; 7.556 siswa SD, 10.565 siswa SMP, 4.515 siswa SMA, 12.038 siswa SMK, dan 3.581 mahasiswa.

Sedangkan bantuan yang akan disalurkan yaitu sebesar Rp 2.160.000 per siswa SD, Rp 4.275.000 (siswa SMP), Rp 2 juta (siswa SMA/SMK), dan Rp 4,8 juta untuk mahasiswa.

Untuk bantuan personal diberikan kepada 18.121 siswa SD dan SMP. Total bantuan personal yaitu sebesar Rp14.572.025.000. Bantuan ini diberikan kepada 7.556 siswa SD sebesar Rp 775.000/siswa, 10.565 siswa SMP dengan bantuan sebesar Rp 825.000 per siswa.

Semua bantuan tersebut berdasarkan proposal yang masuk ke Pemkot Bandung. Di mana proposal bantuan pendidikan

WASTUKANCANA, (GM).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menganggarkan dana sebesar Rp 126.353.160.000 untuk membantu 56.376 siswa dan mahasiswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Terdiri dari bantuan pendidikan dan bantuan personal.

yang masuk berjumlah 448 proposal dan bantuan personal sebanyak 219 proposal.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik PPSD Kota Bandung, Risman Al Isnaeni mengungkapkan, data ini adalah siswa RMP di tahun 2019.

"Alhamdulillah di Juni lalu sudah tersalurkan sebanyak 50 persen," katanya di Balai Kota Bandung.

Ia memprediksi, pada tahun 2021 mendatang, jumlah siswa RMP akan mengalami peningkatan. Hal itu terkait dengan kondisi ekonomi saat ini yang melemah akibat pandemi Covid-19.

"Untuk itu, perlu ada pendata-

an agar warga yang terdampak bisa terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," katanya.

Tingkat SMA/SMK

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Oded M Danial telah memastikan, siswa RMP tingkat SMA akan memperoleh bantuan dari Pemkot Bandung.

Kepastian itu setelah ia melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat (Jabar), Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi, beserta Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan, Senin (3/8) kemarin.

"Bantuan untuk siswa RMP

SMA sudah bisa dilaksanakan. Kita sudah bertemu dengan Kadisdik Jabar dan sudah tidak ada masalah," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Selasa (4/8).

Perlu diketahui, Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 33,7 miliar untuk siswa RMP SMA/SMK negeri dan swasta.

Berdasarkan nilai tersebut, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun kepada 4588 siswa SMA dan 1.2287 siswa SMK.

Oded mengatakan perlu dibiayai lebih lanjut dengan Disdik Jabar karena kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di Pemerintah Provinsi Jabar.

"Nanti polanya anggarannya dititipkan di provinsi, karena SMA dan SMK itu kewenangan di provinsi. Tetapi karena itu kan warga Mang Oded, nanti kita yang menyuplai bantuannya," jelas Oded. (B.05)**